BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Pada penelitian terdahulu mengenai strategi peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa, dikutip dari beberapa jurnal:

1. Strategi pemerintah desa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di desa jaya kopah kecamatan kuantan tengah kabupaten kuantan singingi, Yosep Gustiman (2021). Hasil penelitian tentang Strategi Pemerintah Desa untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dapat disimpulkan bahwa strategi sudah berjalan dengan cukup baik.
2. Strategi Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat terhadap Pembangunan Desa: Studi Kasus di Bahal Kabupaten Padang Lawas Utara, Susi Apriliani (2023). Hasil penelitian ini menjelaskan Tingkat peran serta masyarakat di Desa Torowang dapat dilihat pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan yang masih tergolong baik dari segi peran serta masyarakat pada tahap perencanaan, tahap pelaksanaan pembangunan dan pemanfaatan serta pemeliharaan.
3. Strategi Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat terhadap Pembangunan di Desa Aikmel, Wafiq Laelatul Kodrianingsih, Rispawati Rispawati, Bagdawansyah Alqadri (2023). Hasil dari penelitian ini mengkaji tentang strategi pemerintah Desa Aikmel dalam meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap pembangunan desa, serta faktor-faktor yang

menghambat dan mendukung pelaksanaan strategi pemerintah desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap pembangunan

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini

No	Nama Peneliti dan Judul Peneliti	Hasil Penelitian	Relevansi
1	Yosep Gustiman, yang berjudul Strategi Pemerintah Desa Untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Desa Jaya Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi(2021)	Hasil penelitian tentang Strategi Pemerintah Desa untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dapat disimpulkan bahwa strategi sudah berjalan dengan cukup baik.	Relevansi dari penelitian ini adalah sama-sama menggunakan metode kualitatif, namun ada Perbedaan dari kedua penelitian ini yaitu pada penelitian terdahulu berfokus pada apakah strategi sudah dilakukan dengan baik , sedangkan pada penelitian yang akan di lakukan berfokus pada Bagaimana

			partisipasi masyarakat dalam evaluasi pembangunan.
2	Apriliani, yang berjudul Strategi Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat terhadap Pembangunan Desa: Studi Kasus di Bahal Kabupaten Padang Lawas Utara(2023)	Hasil penelitian ini menjelaskan Tingkat peran serta masyarakat di Desa Torowang dapat dilihat pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan yang masih tergolong baik dari segi peran serta masyarakat pada tahap perencanaan, tahap pelaksanaan pembangunan dan pemanfaatan serta pemeliharaan.	Relevansi dari penelitian ini adalah sama-sama menggunakan metode kualitatif dan sama-sama meneliti terkait seberapa tinggi tingkat partisipasi masyarakat pada tahap pembangunan .
3	Kodrianingsih, Rispawati, Alqadri, yang berjudul Strategi Pemerintah	Strategi pemerintah	Relevansi dari penelitian ini

	Desa dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat terhadap Pembangunan di Desa Aikmel(2023)	desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap pembangunan di Desa Aikmel berjalan sesuai dengan rancangan yang sudah dibuat oleh pemerintah desa, kesesuaian berdasarkan indikator dari strategi pemerintah desa	ada sama-sama menggunakan metode kualitatif dan juga sama meneliti tekait Bagaimana strategi pemerintah meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan

2.2. Strategi Pemerintah

2.2.1. Definisi Strategi

Pengertian strategi ada beberapa macam yang dapat dikememukakan oleh para ahli berdasarkan dalam buku karya mereka masing-masing.Dalam bahasa Yunani Strategi berasal dari kata*"strategos*" yang memiliki arti panglima yang diharapkan dapat mengatur segala rencana untuk dapat mencapai tujuan.

Menurut chandler dalam kuncoro (2016:1) Strategi adalah penentuan tujuan dan sasaran jangka panjang organisasi, diterapkannya aksi dan alokasi sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Iman Mulyana dalam Timpal dkk (2021:3). Strategi adalah ilmu dan seni menggunakan kemampuan bersama sumberdaya dan lingkungan secara efektif yang terbaik. Menurut Chandler dalam Rusdiana dkk (2021:429) strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan perusahaan dalam kaitannya dengan tujuan jangka panjang, program tindak lanjut, serta prioritas alokasi sumber daya.

Berdasarkan pendapat Para Ahli yang di kemukakan diatas, disimpulkan bahwa strategi merupakan langkah-langkah dalam penentuan tujuan atau rencana program,serta penerapan aksi dan alokasi sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan tertentu yang telah ditetapkan terutama tujuan jangka panjang organisasi atau lembaga agar berjalan secara efektif dan baik.

2.2.2. Indikator Strategi

Menurut Geoff Mulgan dalam Amelia (2023:105), menguraikan strategi ke dalam 4 Indikator, yaitu :

1. *Purposes* (Tujuan)

   Teori yang dikemumakakan oleh konsep masyarakat Jepang tentang tujuan *(purposes)* itu sendiri,yang dinamakan *Ikigai*,yang merupakan konsep masyarakat konsep masyarakat Jepang yang berarti sebuah alasan untuk tujuan.Dimana indikator dari *Ikigai* adalah,*mission* (misi) dan *passion/vocation* (bakat/kemampuan).Dari indikator konsep masyarakat Jepang tentang tujuan tersebut dapat kita ketahui bahwa untuk memiliki sebuah tujuan dibutuhkan misi dan kemampuan untuk menjalankan dan mengimplemtasikan misi tersebut.

2. *Direction* (Pengarahan)

   Pada bagian ini terdapat empat indikator pengarahan atau *directions,* diantaranya adalah koordinasi *(coordination),* motivasi *(motivation),* komunikasi *(communication),* dan perintah *(command)*.pada *directions* atau pengarahan dapat kita ketahui ada empat indikator yang dapat menjadi acuan dari sebuah pengarahan (*George* R. *Terry* 1986).

3. *Action* (Tindakan)

   Pada bagian ini terdapat tiga indikator,dintaranya adalah *external situasiton* (situasi eksternal), *device* (perangkat yang digunakan),dan *decission making* (pengambilan keputusan).

4. *learning* (Pembelajaran)

   Pada bagian ini terdapat dua indikator penting diantaranya,adalah *comparation method* (metode perbandingan),dan *identification* (indefikasi).

2.2.3. Tipe-Tipe Strategi

Menurut Kotten, Samsuriadi, dalam Aliyah dkk,(2022:117). menjelaskan ada 4 (empat) tipe-tipe strategi.adapun yang dikemukakan keseluruhan adalah sebagai berikut.

1. Strategi organisasi *(Corporate Strategy*)

   Strategi ini berkaitan dengan perumusan visi misi dan tujuan organisasi dimana biasanya strategi dirumuskan melalui visi misi suatu organiasi atau lembaga pemerintahan seperti yang termuat dalam rencana strategis ataupun rencana-rencana masa depan organisasi.

2. Strategi program *(Program Strategy)*

   Tipe strategi ini cenderung memperhatikan dampak atau implikasi strategis program tertentu. Jika suatu program dijalankan apa dampak yang nantinya akan dirasakan masyarakat, apakah masyarakat akan merasakan manfaat positif program yang dijalankan atau tidak.

3. Strategi pendukung sumber daya *(Resource Support Strategy)*

   Tipe strategi ini memfokuskan pada pengoptimalan berbagai sumber daya yang tersedia untuk meningkatkan kinerja organisasi. Sumber daya itu dapat berupa sarana prasarana, tenaga, teknologi, keuangan dan lainnya.

4. Strategi kelembagaan *(Institutional Strategi)*

   Tipe strategi kelembangaan ini memfokuskan berkaitan dengan pengembangan kemampuan organisasi untuk melaksanakan inisiatif-inisiatif strategis yang telah direncanakan pada peningkatan kualitas atau kemampuan sebuah organisasi dalam memanfaatkan seefektif mungkin unsur-unsur

kelembagaan seperti aturan organisasi, kewenangan dan tanggung yang dimiliki instansi tersebut dalam mendukung suatu program.

2.2.4. Definisi Pemerintah Desa

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pemerintah desa adalah lembaga pemerintahan terendah yang berada di bawah pimpinan kepala desa, bertugas menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri dan terdiri atas kepala desa dan lembaga musyawarah desa. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa (Ramadana et al. 2013). Dari pengertian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa Pemerintah Desa adalah unit penyelenggara pemerintahan terkecil yang berkedudukan di wilayah Kabupaten/Kota dan memiliki batas wilayah dan juga memiliki kewenangan untuk mengatur sendiri urusan pemerintahannya.

Menurut Sutardjo Kartohadikusumo dalam Tomisa,dkk, (2020:95). Pengertian desa adalah suatu kesatuan hukum dan didalamnya bertempat tinggal sekelompok masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintah sendiri. Dengan kata lain Desa juga memiliki otonomi Desa dan dengan diberikannya otonomi desa, pemerintah Desa berhak mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa sesuai dengan kondisi sosial budaya lokal masyarakat setempat. Hal ini selaras dengan pengertian Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 1 angka 2 pemerintah desa adalah kasatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dan memiliki

kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat.

Dari pendapat di atas dapat dikatakan bahwa strategi pemerintah desa adalah langkah-langkah atau tindakan pemerintah untuk mencapai tujuan pembangunan desa. Dengan adanya strategi pemerintah desa yang baik, Desa dapat meningkatkan pelayanan publik, mengoptimalkan pengelolaan keuangan dan sumber daya alam, serta mengembangkan potensi ekonomi lokal, yang semuanya bertujuan untuk mencapai pembangunan desa yang lebih baik.

2.3. Partisipasi Masyarakat

2.3.1 Pengertian Partisipasi

Pengertian partisipasi berasal dari bahasa inggris yaitu dari kata *"partisipation"* yang dapat diartikan suatu kegiatan untuk membangkitkan perasaan dan diikutsertakan atau ambil bagian dalam kegiatan suatu organisasi. Partisipasi berarti peran serta seseorang atau kelompok masyarakat dalam proses pembangunan baik dalam bentuk pernyataan maupun dalam bentuk kegiatan dengan memberi masukan pikiran, tenaga, waktu, keahlian, modal dan atau materi, serta ikut memanfaatkan dan menikmati hasil-hasil pembangunan (I Nyoman Sumaryadi, 2010). Menurut Andriani (2018) partisipasi bisa di artikan sebagai keterlibatan seseorang secara sadar kedalam interaksi sosial dalam situasi tertentu.

Menurut H.A.R.Tilaar, dalam Masruri (2020:1172), mengungkapkan partisipasi adalah sebagai wujud dari keinginan untuk mengembangkan demokrasi melalui proses desentralisasi dimana diupayakan antara lain perlunya perencanaan

dari bawah *(bottom-up)* dengan mengikutsertakan masyarakat dalam proses perencanaan dan pembangunan masyarakatnya. partisipasi merupakan keterlibatan seseorang dalam suatu kegiatan, baik keterlibatan secara langsung maupun tidak langsung.

2.3.2 Definisi Masyarakat

Menurut Linton (2018:76) Masyarakat adalah sekelompok manusia yang telah cukup lama hidup dan bekerja sama sehingga dapat terbentuk organisasi yang mengatur setiap individu dalam masyarakat tersebut dan membuat setiap individu dalam masyarakat dapat mengatur diri sendiri dan berfikir tentang dirinya sebagai suatu kesatuan sosial dengan batasan tertentu. Dengan kata lain, masyarakat bukan hanya kumpulan individu, namun sebuah kesatuan sosial yang tersusun dari interaksi dan kerja sama berlangsung lama yang menciptakan keteraturan dan kesadaran kolektif antar anggotanya. Menurut Peter L. Berger (2018:76),masyarakat adalah suatu keseluruhan kompleks hubungan manusia yang luas sifatnya. Keseluruhan yang kompleks sendiri berarti bahwa keseluruhan itu terdiri atas bagian-bagian yang membentuk suatu kesatuan. Menurut Gunsu Nurmansyah dkk, (2019: 46) dijelaskan bahwa definisi masyarakat adalah sejumlah manusia yang jadi satu kesatuan golongan yang berhubungan tetap dan mempunyai kepentingan yang sama. Selain itu, Masyarakat bisa diartikan sebagai salah satu satuan sosial dalam sistem sosial, atau kesatuan hidup manusia.

Berdasarkan uraian diatas bahwa dalam pembangunan, partisipasi masyarakat merupakan keterlibatan seseorang atau kelompok masyarakat dalam

kegiatan suatu organisasi secara sadar tanpa paksaan dari setiap individu untuk bekerja sama dengan memberikan masukan pikiran,tenaga,waktu dan materi yang ingin dikembangkan atau diwujudkan untuk mencapai tujuan bersama dalam perencanaan pembangunan desa.

2.4. Perencanaan Pembangunan Desa

2.4.1 Definisi Perencanaan Pembangunan

Definisi perencanaan menurut Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), adalah perencanaan sebagai suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Daerah.

Perencanaan pembangunan merupakan proses sistematis dan terarah untuk merumuskan dan mengalokasikan sumber daya guna mencapai tujuan pembangunan yang lebih baik secara efektif dan efisien. Menurut Arthur W. Lewis (dalam Jauhariah, Syamsudin,2023:215), Mendefenisikan perencanaan pembangunan sebagai suatu kumpulan kebijaksanaan dan program pembangunan untuk merangsang masyarakat dan swasta untuk menggunakan sumberdaya yang tersedia lebih produktif. Sedangkan Jenseen,(dalam Jauhariah, Syamsudin, 2023:215),merekomendasikan perencanaan pembangunan daerah harus memperhatikan hal-hal yang bersifat kompleks,sehingga prosesnya harus memperhitungkan kemampuan sumber daya yang ada, baik sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya fisik, dan sumber daya lainnya.

2.4.2 Pelaksanaan Pembangunan

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci,implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah di anggap siap.Menurut Suparmoko dan Widodo (2021), pelaksanaan pembangunan adalah proses mengoperasionalkan rencana pembangunan ke dalam bentuk kegiatan konkret yang dilakukan oleh berbagai pelaku pembangunan, baik pemerintah, sektor swasta, maupun masyarakat, dengan memanfaatkan sumber daya secara optimal untuk mencapai tujuan pembangunan.Kemudian,menurut Maulana (2020) menyatakan bahwa pelaksanaan pembangunan seharusnya tidak hanya memfokuskan pada pembangunan fisik, tetapi juga harus memberi perhatian yang seimbang pada pembangunan sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan. Hal ini penting agar pembangunan bersifat holistik dan berkelanjutan. Ia menambahkan bahwa pelaksanaan yang tidak sesuai dengan rencana atau mengabaikan partisipasi masyarakat akan berisiko menciptakan ketimpangan, pemborosan anggaran, dan resistensi sosial.

2.5. Evaluasi Pembangunan

2.5.1 Definisi Evaluasi Pembangunan

Evaluasi pembangunan merupakan tahap dasar dalam siklus pembangunan yang berfungsi sebagai alat pengawasan dan penilaian yang sistematis terhadap proses, pelaksanaan, dan hasil dari suatu program atau kebijakan pembangunan. menurut Daniel L. Stufflebeam evaluasi pembangunan adalah suatu proses pengumpulan, analisis, dan penyajian informasi secara sistematis untuk menilai

perencanaan, pelaksanaan, serta hasil pembangunan, yang bertujuan mendukung pengambilan keputusan dan perbaikan program pembangunan di masa yang akan datang. yang artinya evaluasi tidak hanya berfokus pada hasil akhir, tetapi juga mencakup keseluruhan tahapan pembangunan sebagai dasar peningkatan kualitas pembangunan secara berkelanjutan. evaluasi pembangunan adalah suatu kegiatan yang bertujuan menilai efektivitas, kecukupan, responsivitas, dan ketepatan pelaksanaan program pembangunan agar dapat mengetahui faktor pendukung dan penghambat demi keberlanjutan pembangunan (Shofi, 2018). kemudian menurut Suchman dalam (Vanlik Gerri 2021:101),evaluasi pembangunan adalah sebuah proses menentukan hasil yang telah dicapai dalam beberapa kegiatan yang direncanakan untuk mendukung tercapainya tujuan. evaluasi pembangunan yang baik harus berbasis data dan bukti (*evidence-based*), serta melibatkan berbagai pemangku kepentingan secara inklusif (Isnaini dan Nugroho 2023). Hal ini bertujuan agar hasil evaluasi tidak hanya akurat, tetapi juga relevan dengan konteks sosial dan lokal.

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa Evaluasi pembangunan adalah proses atau tindakan dalam pelaksanaan suatu program pembangunan dengan mengukur efektivitas,efisiensi,serta dampak dari pelaksanaan pembangunan untuk memperbaiki strategi pembangunan ke depan agar lebih responsif, inklusif, dan berkelanjutan.

2.5.2 Sifat Evaluasi

Menurut William Dunn (2003:608) terdapat empat sifat evaluasi yaitu:

1. Fokus Nilai

   Evaluasi berbeda dengan pemantauan,dipusatkan pada penilaian menyangkut keperluan atau nilai dari suatu kebijakan atau program.evaluasi merupakan usaha untuk menentukkan manfaat atau kegunaan sosial kebijakan atau program dan bukan sekedar usaha untuk mengumpulkan informasi mengenai hasil aksi kebijakan yang terantisipasi dan tidak terantisipasi.

2. Interdependensi Fakta Nilai

   Tuntutan evaluasi tergantung baik “fakta” maupun “nilai”. Untuk menyatakan bahwa kinerja kebijakan atau program tertentu telah mencapai tingkat kinerja tertinggi atau terendah diperlukan tidak hanya hasil kebijakan berharga bagi sejumlah individu,kelompok,atau seluruh masyarakat.Untuk menyatakan demikian,harus di dukung oleh bukti bahwa hasil-hasil kebijakan secara aktual merupakan konsekuensi dari aksi-aksi yang dilakukan untuk memecahkan masalah tertentu. Oleh karena itu,pemantauan merupakan prasyarat bagi evaluasi.

3. Orientasi Masa Kini dan Masa Lampau

   Evaluasi bersifat retrospektif,dan dilakukan setelah aksi atau tindakan selesai.maksudnya proses penilian atau peninjauan kembali terhadap suatau kegiatan,proyek,atau peristiwa setelah semuannya terjadi atau selesai dilaksanakan untuk melihat hasil,dampak,dan mengambil pelajaran dari pengalaman tersebut.

4. Dualitas Nilai

Nilai mendasari tuntutan evaluasi mempunyai kualitas ganda,karena mereka di pandang sebagai tujuan dan sekaligus cara.

2.5.3.Model-model Evaluasi

Menurut Daniel L. Stufflebeam, dalam Mulyatiningsih (2011: 127-132), menguraikan terdapat empat model evaluasi pembangunan yaitu:

1. Konteks *(context)* merupakan proses untuk mengidentifikasi kondisi, kebutuhan, serta permasalahan yang ada di masyarakat yang menjadi dasar dilaksanakannya suatu pembangunan.
2. Evaluasi Masukan *(Input)* merupakan penilaian terhadap sumber daya, strategi, serta perencanaan yang digunakan tepat untuk mencapai tujuan pembangunan.
3. Evaluasi Proses *(process)* adalah kegiatan untuk memantau dan menilai pelaksanaan pembangunan yang sedang berjalan.
4. Evaluasi Produk/Hasil *(Product)*,merupakan penilaian terhadap hasil atau dampak yang dihasilkan dari suatu pembangunan.

Dari pendapat diatas dapat dikatakan evaluasi pembangunan adalah suatu proses untuk mengidentifikasi kondisi dan kebutuhan yang ada di masyarakat, serta memberikan penilaian terhadap sumber daya, strategi, dan pelaksanaan pembangunan yang sedang berlangsung, hingga menilai hasil atau dampak yang dihasilkan dari pembangunan yang telah dilaksanakan.

2.5.3 Fungsi Evaluasi

Menurut Dunn (2003:609),evaluasi memiliki tiga fungsi yaitu:

1. Pertama, dan yang paling penting, evaluasi memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan telah dapat dicapai melalui tindakan publik.Dalam hal ini evaluasi mengungkapkan seberapa jauh tujuan-tujuan tertentu dan target tertentu yang telah dicapai.
2. Kedua, evaluasi memberikan sumbangan kepada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target. Pemilihan nilai dalam mencapai tujuan dan target, tidak di dasari oleh kepentingan-kepentingan nilai dari kelompok, golongan atau partai tertentu. Karena itu, nilai perlu di perjelas dengan mendefinisikan dan mengoperasikan tujuan-tujuan dari target-target yang hendak di capai.
3. Ketiga, evaluasi memberi sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya, termasuk perumusan masalah dan rekomendasi. Informasi tentang tidak memadainya kinerja kebijakan dapat member sumbangan pada perumusan ulang masalah kebijakan, sebagai contoh, dengan menunjukkan bahwa tujuan dan target perlu didefinisikan ulang. Evaluasi dapat pula menyumbang pada definisi alternatif kebijakan yang baru atau revisi kebijakan dengan menunjukkan bahwa alternatif kebijakan yang diunggulkan sebelumnya perlu dihapus dan diganti dengan yang lain.

2.5.4 Pendekatan Terhadap Evaluasi

Menurut Dunn (2003:611) terdapat tiga macam pendekatan terhadap evaluasi, yaitu :

1. Evaluasi Semu *(Pseudo Evaluation)* adalah pendekatan yang menggunakan metode-metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai hasil kebijakan, tanpa berusaha untuk menanyakan tentang manfaat atau nilai dari hasil-hasil tersebut terhadap individu, kelompok, atau masyarakat secara keseluruhan. Asumsi utama dari evaluasi semu adalah bahwa ukuran tentang manfaat atau nilai merupakan sesuatu yang dapat terbukti sendiri *(self evident)* atau tidak kontroversial. Bentuk bentuk utama dari evaluasi semu mencakup berbagai pendekatan untuk pemantauan : Menganalisis perubahan kondisi sosial (objektif dan subjektif) dari waktu ke waktu,Menggunakan metode eksperimen untuk mengukur hasil dari suatu intervensi atau program,Memeriksa kepatuhan program terhadap standar atau kebijakan yang ada dan Menggabungkan temuan penelitian dengan praktik lapangan untuk pemahaman yang lebih komprehensif.
2. Evaluasi Formal *(Formal Evaluation)* merupakan pendekatan yang menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang valid dan cepat dipercaya mengenai hasil-hasil kebijakan tetapi mengevaluasi hasil tersebut atas dasar tujuan program kebijakan yang telah diumumkan secara formal oleh pembuat kebijakan dan administrator program. Asumsi utama dari evaluasi formal adalah bahwa tujuan dan target diumumkan secara formal adalah merupakan ukuran yang tepat untuk manfaat atau nilai

kebijakan program. Dalam evaluasi formal analisis menggunakan berbagai macam metode yang sama seperti yang dipakai dalam evaluasi semu dan tujuannya adalah identik : untuk menghasilkan informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai variasi-variasi hasil kebijakan dan dampak yang dapat dilacak dari masukan dan proses kebijakan.

3. Evaluasi Keputusan Teoritis *(Decision-Theoretic Evaluation)* adalah pendekatan yang menggunakan metode-metode diskriptif untuk menghasilkan informasi yang dapat dipertanggung-jawabkan dan valid mengenai hasil-hasil kebijakan yang secara eksplisit dinilai oleh berbagai macam pelaku kebijakan. Perbedaan pokok antara evaluasi teoritis keputusan di satu sisi, dan evaluasi semu dan evaluasi formal di sisi lainnya, adalah bahwa evaluasi keputusan teoritis berusaha untuk memunculkan dan membuat eksplisit tujuan dan target dari pelaku kebijakan baik yang tersembunyi atau yang dinyatakan. Ini berarti bahwa tujuan dan target para pembuat kebijakan dan administrator merupakan salah satu sumber nilai, karena semua pihak yang mempunyai adil dalam memformulasikan dan mengimplementasikan kebijakan (sebagai contoh, staf tingkat menengah dan bawah, pegawai pada badan-badan lainnya, kelompok klien) dilibatkan dalam merumuskan tujuan dan target di mana kinerja nantinya akan diukur.